

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini diperluas dengan adanya analisis dari studi sebelumnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini, yaitu tentang penerapan Pendidikan Demokrasi dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maryam dkk. (2022) menunjukkan bahwa pembelajaran pada mata pelajaran PKn efektif digunakan untuk implementasi nilai-nilai demokrasi di SMP Negeri 11 Madiun. Ditunjukkan dengan adanya perubahan baik karakter demokratis yang ada pada diri siswa. Hampir semua siswa kelas 8 memahami nilai-nilai demokrasi, dan siswa sudah berperilaku demokratis dengan aspek nilai yang diterapkan yaitu siswa menjadi aktif, disiplin, tanggung jawab dan memiliki keberanian.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini (2017) menggambarkan bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai demokrasi dalam silabus dan RPP yang meliputi toleransi, kerja sama, kebebasan berpendapat, saling menghormati dan percaya. Faktor pendukungnya adalah fasilitas pembelajaran, budaya sekolah dan kepemimpinan sekolah. Faktor penghambatnya adalah berkurangnya orang tua pemrakarsa, lingkaran masyarakat, dan perbedaan pribadi. Solusinya adalah kesadaran dari orang tua untuk memperhatikan anaknya, keterlibatan masyarakat, dan menjalin komunikasi yang baik dengan siswa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Sudarsono (2018) membuktikan bahwa Pendidikan Demokrasi sudah terimplementasikan secara baik melalui Mata Pelajaran IPS dengan nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan yaitu toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi, kebebasan berkelompok, menghormati orang lain, kepercayaan diri dan kesadaran akan perbedaan yang dilaksanakan melalui metode diskusi, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Faktor-Faktor Pendukung Pada Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar yaitu Sarana dan

Prasarana pendukung yang dimanfaatkan guru antara lain LCD, Laptop, dan beberapa buku referensi pendukung menjadi faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran, dan Faktor-Faktor Penghambat Pada Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Proses Pembelajaran IPS di SMA Negeri 6 Takalar yaitu Perbedaan individual, perbedaan kemampuan antar siswa menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2021) menjabarkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi pedagogik guru, gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi kepribadian guru, kepemimpinan demokratis kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi kepribadian guru, gaya mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. kompetensi profesional guru, gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi sosial guru.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliardi (2015) menjabarkan bahwa pendidikan karakter bertujuan untuk kembali menghidupkan karakter warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, antara lain nilai ketakwaan, nilai keimanan, nilai kejujuran, nilai kepedulian, hingga nilai etika atau sopan santun. PKn merupakan salah satu sarana yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai dalam pendidikan karakter kepada peserta didik, karena tujuan PKn pada dasarnya adalah untuk menciptakan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan karakter tepat diimplementasikan melalui PKn dalam membentuk akhlak generasi muda.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2017) menunjukkan bahwa pendidikan nonformal memiliki keistimewaan dalam berbagai hal. Mulai dari sifatnya yang luwes, pembelajarannya yang begitu heterogen, dan tentunya mengakomodir kebutuhan belajar para pembelajarannya tanpa melihat latar belakangnya. Maka dari itu pendidikan nonformal merupakan sarana potensi yang besar dalam menumbuhkan karakter demokratis, dilihat dari tiga sudut pandang yakni peningkatan dan penguat kualitas individu, dimana setiap individu yang

memiliki karakter demokratis tentulah individu-individu yang memiliki kualitas. Selanjutnya adalah pilar pembangunan masyarakat, dimana masyarakat yang memiliki karakter demokratis tentunya dibangun dari masyarakat yang memiliki daya kritis dan aktif terhadap kegiatan berbangsa dan bernegara. Serta yang terakhir adalah inkubator gerakan sosial, dimana satuan maupun program pendidikan nonformal memberikan akses terhadap meningkatnya gerakan sosial yang memberdayakan seperti gerakan pemuda dan perempuan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sayektiningsih dkk. (2017) menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan MAM Klaten dilaksanakan dengan mempersiapkan rencana pembelajaran berupa RPP yang mencantumkan nilai-nilai karakter yang hendak dicapai, mempersiapkan media dan sumber pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif, mengadakan penilaian atau evaluasi yang meliputi, penilaian sikap (afektif) dengan menggunakan skala sikap yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas dalam ekstra kurikuler ataupun kegiatan-kegiatan lain berupa pembiasaan di madrasah dan pondok pesantren, sedangkan penilaian pengetahuan (kognitif) dilaksanakan melalui ulangan-ulangan.

Hasil penelitian dari Wadham dkk. (2024) menyebutkan bahwa Pendidikan Demokrasi merupakan salah satu pendekatan penting dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk membentuk siswa sebagai individu yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik pedagogis yang mendasari Pendidikan Demokrasi harus mampu merepresentasikan prinsip-prinsip demokrasi, baik dalam proses belajar mengajar maupun hubungan guru dan siswa. Meskipun memiliki landasan teori yang kuat, praktik pedagogis guru yang mewakili prinsip-prinsip teori Pendidikan Demokrasi tidak dipahami secara holistik. Penelitian tersebut menganalisis dan mengintegrasikan literatur yang ada tentang praktik kelas, dan ditemukan empat metode pendekatan pedagogis yang melibatkan praktik Pendidikan Demokrasi yaitu metode penyelidikan, metode artistik, metode lisan, dan metode berpusat pada siswa.

Hasil penelitian dari Yusuf dkk. (2019) menyimpulkan bahwa Pendidikan Demokrasi di Sekolah Menengah Atas yang ada di Surakarta telah diimplementasikan melalui pembiasaan terhadap siswa untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam lingkungan sekolah. Pembiasaan tersebut diantaranya adalah siswa dilatih untuk terbuka dan berani mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat teman dan guru, meningkatkan mutu interaksi komunikasi antara siswa dan guru serta sesama siswa. Hasil penelitian tersebut juga mengevaluasi implementasi Pendidikan Demokrasi di Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Kota Surakarta yang menunjukkan bahwa siswa tidak dipandang sebagai objek, namun sebagai subjek dalam pembelajaran. Implementasi Pendidikan Demokrasi di tiap sekolah juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki siswa dan sekolah dalam mengimplementasikan Pendidikan Demokrasi dalam Mata Pelajaran PPKn.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Botha dkk. (2016) menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi yang tepat untuk anak-anak sekolah di Afrika Selatan ditetapkan dalam konstitusi, dan kurikulum nasional bertujuan untuk membekali semua siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Nilai-nilai demokrasi yang diajarkan di sekolah yaitu tanggung jawab, rasa hormat, dan kebebasan berekspresi. Upaya sekolah dalam mengkonkretkan konsep nilai tersebut yaitu menggunakan aktivitas “Pohon Janji”, di mana anak berusia 9 tahun menulis nilai-nilai mereka di atas daun kertas yang kemudian mereka tempel di pohon polistirena besar. Penelitian tersebut melaporkan pengalaman yang di dapat siswa sebagai investigasi penelitian yang menangkap ide anak-anak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Parker (2010) menyebutkan bahwa implementasi Pendidikan Demokrasi di sekolah dapat dilakukan melalui diskusi. Mendengarkan dan berbicara kepada apa yang disebut “orang asing” tentang ide-ide yang kuat dan masalah publik sangat penting bagi pembentukan warga negara yang demokratis. Penelitian tersebut mengambil dua kasus empiris untuk diskusi kelas, yang pertama siswa sekolah menengah mempertimbangkan apakah bunuh diri dengan bantuan dokter harus dilegalkan di negara bagian mereka dan kedua

yaitu siswa sekolah menengah di pinggiran kota mengadakan seminar tentang novel Howard Fast tentang revolusi Amerika, *April Morning*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chotim (2022) menunjukkan bahwa implementasi Pendidikan Demokrasi difokuskan pada kesetaraan gender. Kesetaraan gender dalam pendidikan masih berlangsung di Indonesia karena adanya budaya patriarki dan stigma bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi yang pada akhirnya mereka akan menjadi ibu rumah tangga saja. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesetaraan gender di sekolah perlu memperhatikan beberapa faktor seperti kapasitas sumber daya manusia dan jaringan kemitraan. Faktor tersebut jika diterapkan dapat mengkonkretkan kesetaraan gender di sekolah yang diimplementasikan melalui pembelajaran responsif gender, perencanaan pembelajaran, pengaturan kelas, penggunaan bahasa, dan interaksi kelas berbasis gender.

B. Kajian Teori

1. Kajian tentang Pendidikan Demokrasi

a. *Pengertian Demokrasi.* Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan cratein atau cratos, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (Ubaidillah dan Rozak, 2008). Hans Kelsen sebagaimana dikutip dalam Thalbah (2009) demokrasi merupakan sebuah proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Awal dari datangnya ide demokrasi menurut Hans Kelsen adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pertama kali, kosakata “kebebasan” dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Pengertian “kebebasan” semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban. Namun, hal inilah yang ditolak oleh Hans Kelsen, pasalnya ketika manusia berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide “kebebasan” tidak bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan, namun ide “kebebasan” dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri. Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran Hans Kelsen mengenai demokrasi. Menurut Lincoln, sebagaimana dikutip dalam Yuliana (2019) demokrasi adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat, sehingga demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan diatas, demokrasi merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta kebebasan dan perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana rakyat memegang secara penuh dalam pemerintahan.

b. *Prinsip Demokrasi.* Prinsip-prinsip demokrasi merupakan sebuah bentuk atau mekanisme dalam sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang di jalankan pemerintah Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis apabila mekanisme pelaksanaannya

di dasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. negara yang demokratis adalah Negara yang pemerintahan dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip demokrasi juga mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang di jalankan pemerintah.

c. *Nilai Demokrasi*. Menurut Winarno (2007:69), nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu yang bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Nilai tidak hanya tampak pada sebagai nilai bagi seseorang saja, melainkan bagi segala umat manusia. Nilai tampil sebagai suatu yang patut dikerjakan dan dilaksanakan oleh semua orang. Oleh karena itu, nilai dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi perlu ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai demokrasi dianggap baik dan positif bagi setiap warga. Setiap warga menginginkan tegaknya demokrasi di negaranya. Menurut Winarno (2007), yang termasuk dalam kultur atau nilai-nilai demokrasi antara lain yaitu:

- 1) Toleransi
- 2) Kebebasan mengemukakan pendapat
- 3) Mengormati perbedaan pendapat
- 4) Memahami keanekaragaman dalam masyarakat
- 5) Terbuka dan komunikasi
- 6) Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan
- 7) Percaya diri
- 8) Tidak menggantungkan pada orang lain
- 9) Saling menghargai
- 10) Mampu mengekang diri
- 11)Kebersamaan

d. *Pengertian Pendidikan Demokrasi.* Pendidikan Demokrasi merupakan bagian penting dari pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara yang memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan demokrasi tidak hanya berfokus pada penguasaan konsep demokrasi, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan partisipatif peserta didik. John Dewey memandang pendidikan demokrasi sebagai proses pendidikan yang menekankan pengalaman langsung dalam kehidupan sosial.

e. *Implementasi Pendidikan Demokrasi.* Menurut Nur dan Sudarsono (2018), Implementasi secara umum diartikan sebagai proses penerapan atau pelaksanaan suatu konsep, kebijakan, atau program agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan. Implementasi dalam Pendidikan diartikan sebagai penerapan konsep atau nilai pendidikan ke dalam praktik nyata pembelajaran dan kehidupan sekolah. Dengan demikian, implementasi pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai proses penerapan nilai-nilai demokrasi ke dalam kegiatan pendidikan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, interaksi guru dan siswa, maupun budaya sekolah. Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis sebagai sarana utama implementasi pendidikan demokrasi di sekolah. Melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila, nilai-nilai demokrasi diajarkan sekaligus dipraktikkan dalam pembelajaran. Pendidikan Pancasila merupakan media yang paling relevan untuk menanamkan nilai demokrasi karena memuat dimensi nilai, norma, dan moral yang selaras dengan prinsip demokrasi Pancasila (Zamroni, 2011).

2. Kajian tentang Pendidikan Pancasila di Indonesia

a. *Landasan Filosofis Pendidikan Pancasila.* Menurut Setijo (2006:12), landasan filosofis Pendidikan Pancasila adalah filsafat Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional. Berdasarkan hal tersebut Pendidikan Pancasila dilandasi oleh Pancasila itu sendiri, beserta Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pancasila sebagai dasar kerohanian dan dasar negara tercantum dalam Alinea ke-4

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara termasuk pendidikan nasional di dalamnya, serta pendidikan Pancasila dan segenap pendidikan mata pelajaran dan mata kuliah yang lainnya.

b. *Tujuan Pendidikan Pancasila*. Berdasarkan landasan filosofis di atas, Pendidikan Pancasila memiliki tujuan mulia dalam pengembangan kepribadian siswa yaitu dengan menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual yang memiliki sikap tanggung jawab, mampu memecahkan masalah, dan mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia (Setijo, 2006:14).

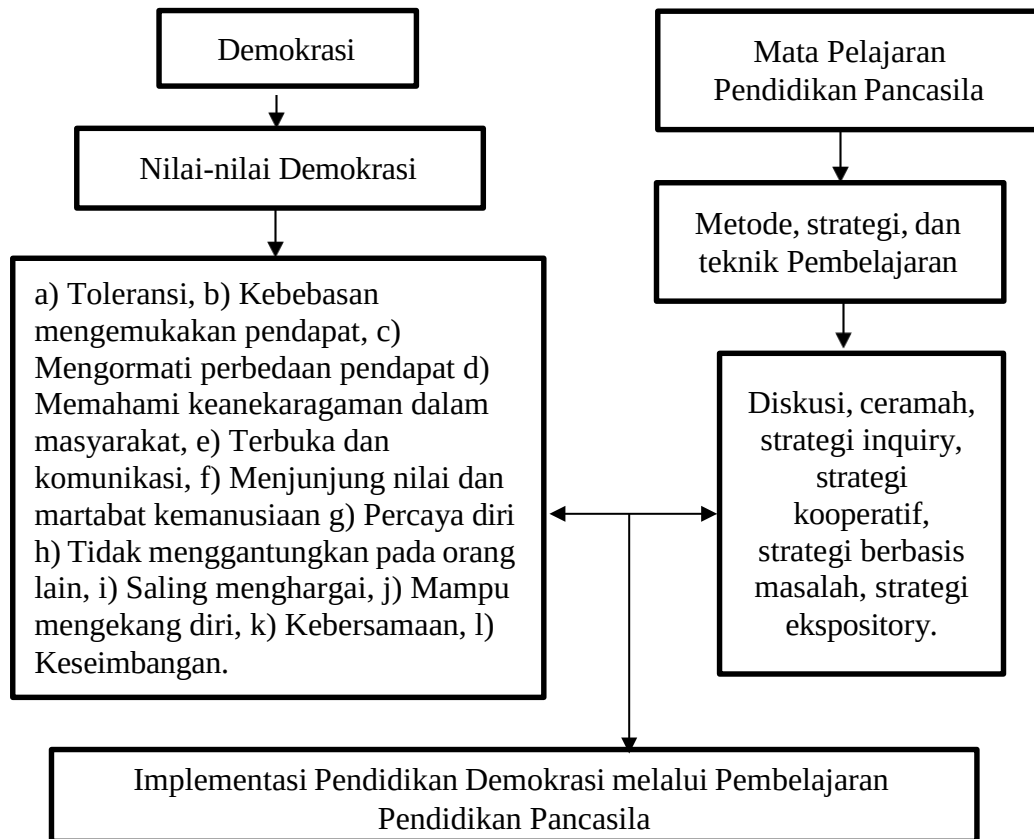
c. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Pancasila*. Banyak siswa yang merasa jenuh dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena terlalu banyak bacaan, banyak hafalan, materi yang sulit, pendidik yang galak dan sebagainya. Pendidikan Pancasila dianggap siswa sebagai pelajaran yang membosankan karena guru sering menggunakan metode ceramah ketika pembelajaran. Menurut Wandini dkk. (2022), pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat menjadi lebih menyenangkan dan tidak membuat jenuh, yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran selain ceramah seperti strategi inquiry, strategi ekspositori, strategi berbasis masalah, strategi kooperatif, dan strategi inovatif. Model pembelajaran yang bervariasi juga dapat digunakan seperti model pembelajaran kontekstual dan kooperatif.

C. Kerangka Berpikir

Pendidikan merupakan sarana strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian warga negara, termasuk menanamkan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi diperlukan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, dan beradab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, toleransi, persamaan hak, musyawarah, dan tanggung jawab sosial tidak cukup hanya dipahami secara konseptual, tetapi harus diimplementasikan melalui praktik pendidikan yang nyata.

Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis sebagai wahana utama implementasi pendidikan demokrasi. Hal ini disebabkan karena Pendidikan Pancasila memuat nilai-nilai dasar kehidupan demokratis yang bersumber dari Pancasila, khususnya sila keempat *“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”*. Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila, peserta didik diarahkan untuk memahami sekaligus mempraktikkan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila diwujudkan dalam beberapa aspek utama, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Pada tahap perencanaan, guru mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, serta penilaian. Nilai-nilai tersebut meliputi toleransi, kebebasan berpendapat, partisipasi aktif, sikap saling menghargai, serta tanggung jawab dalam pengambilan Keputusan. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, pendidikan demokrasi diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran yang bersifat partisipatif dan dialogis, seperti diskusi kelompok, tanya jawab, debat, studi kasus, dan simulasi musyawarah. Metode-metode tersebut memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengemukakan pendapat, mendengarkan pandangan orang lain, serta belajar mengambil keputusan secara bersama-sama. Interaksi yang demokratis antara guru dan peserta didik juga menjadi indikator penting dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi di kelas.



Gambar 1. Kerangka Berpikir